



## **BUPATI SUMENEP**

### **SAMBUTAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena pada tanggal 28 Desember 2020 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman / dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenep.go.id> dan <http://www.dppka-sumenep.net>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, Desember 2020

**BUPATI SUMENEP**

TTD

**KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

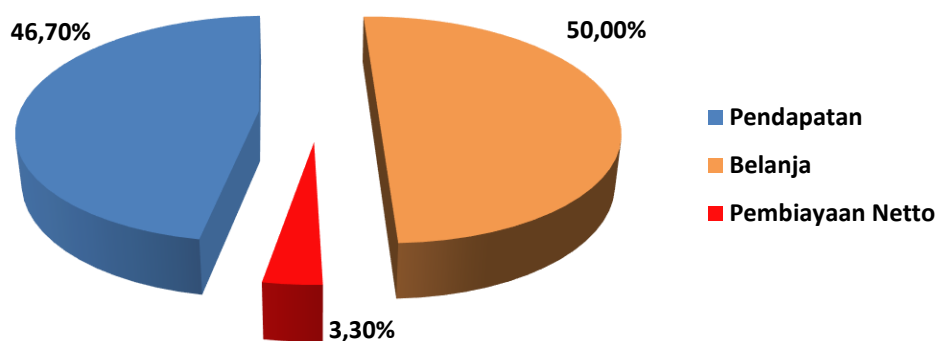
## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

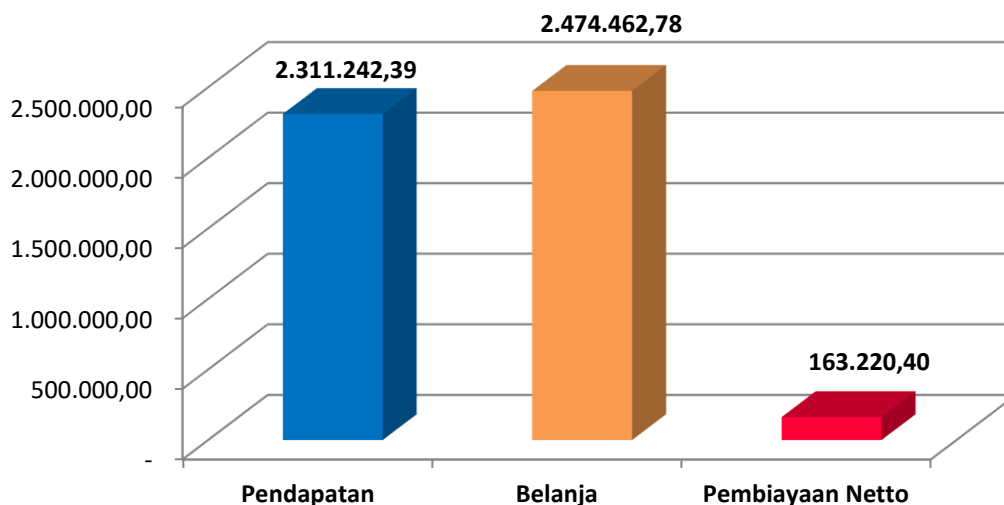
Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Tahun Anggaran 2021 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 83 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2020, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1.a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 1.b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2021 (Dalam jutaan Rupiah)**

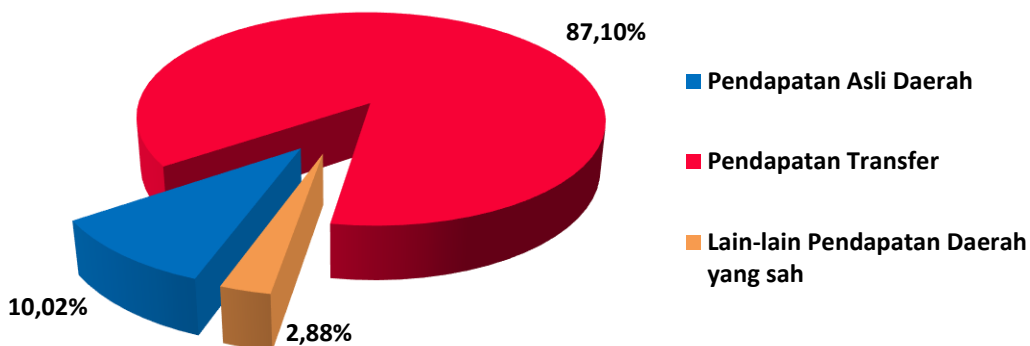


### I. PENDAPATAN

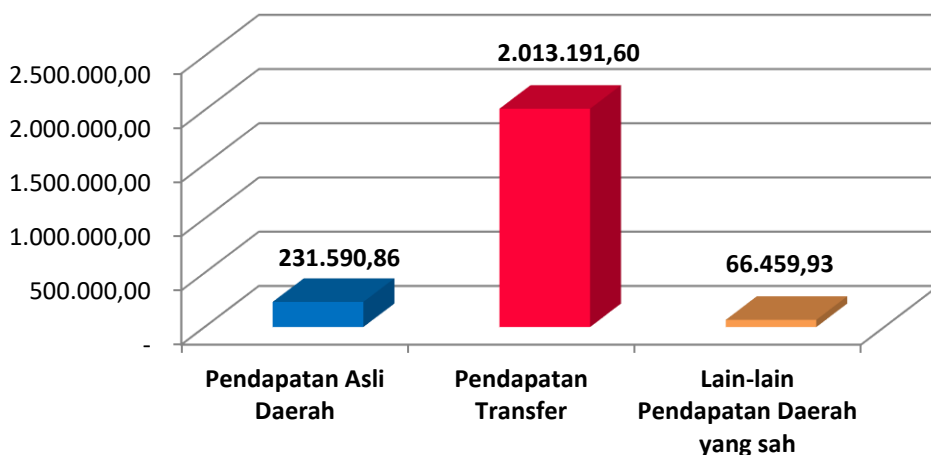
APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.311.242.385.198,- yang direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 231.590.857.122
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.013.191.600.076
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 66.459.928.000</u>
Total Pendapatan	Rp. 2.311.242.385.198

**Gambar 2.a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 2.b. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)**

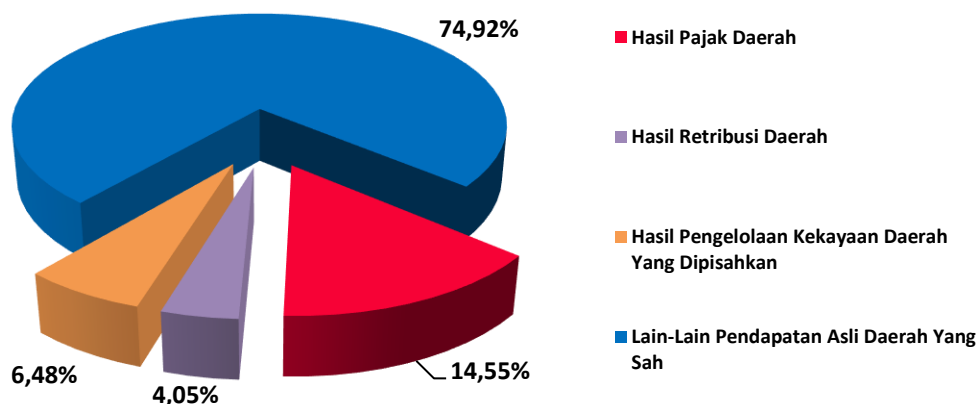


**A. PENDAPATAN ASLI DAERAH**

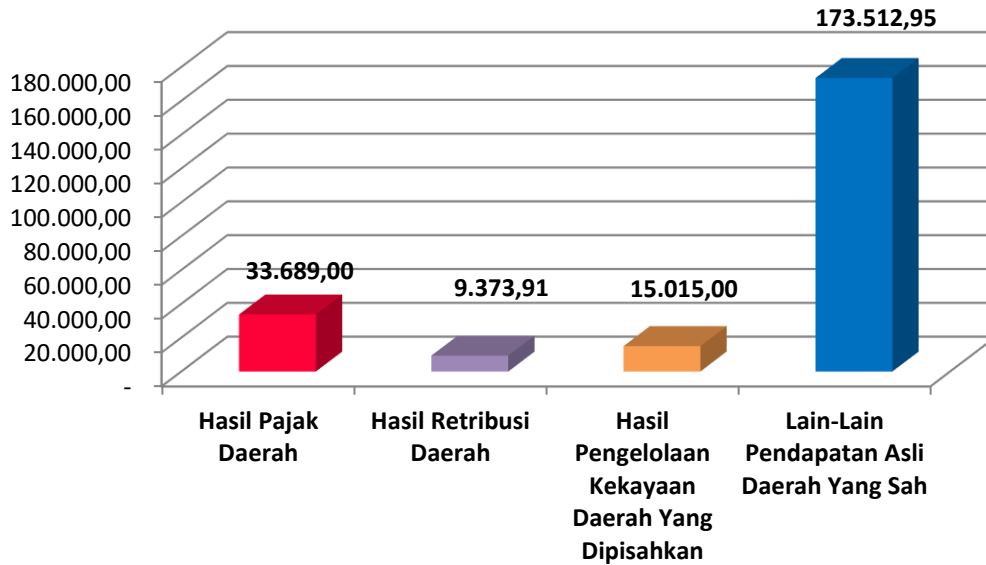
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.231.590.857.122,- terdiri dari :

1. Pajak Daerah	Rp.	33.689.000.000
2. Retribusi Daerah	Rp.	9.373.905.864
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	15.015.000.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	<u>173.512.951.258</u>
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.	231.590.857.122

**Gambar 3.a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 3.b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021  
(Dalam jutaan Rupiah)**

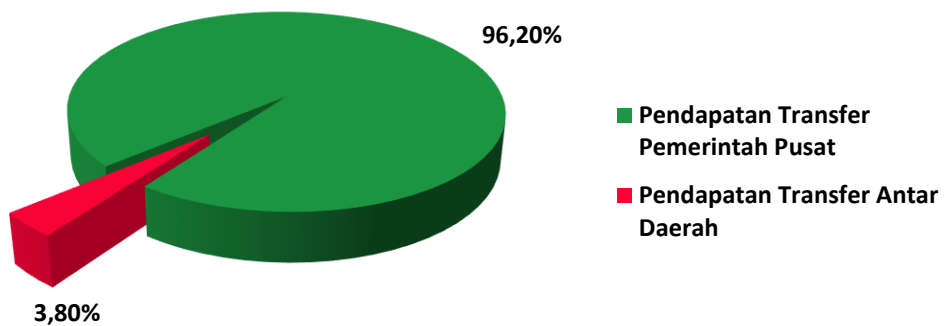


**B. PENDAPATAN TRANSFER**

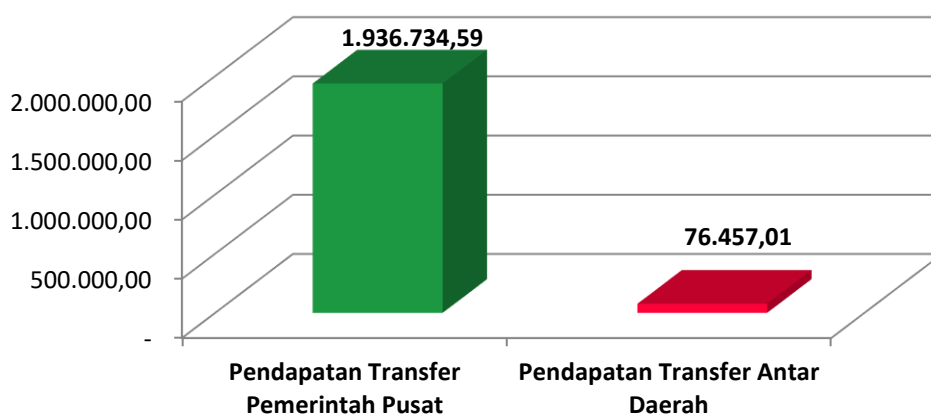
Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp.2.013.191.600.076,- terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.936.734.585.750
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	76.457.014.326
Total Pendapatan Transfer	Rp.	2.013.191.600.076

**Gambar 4.a. Anggaran Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 4.b. Anggaran Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam jutaan Rupiah)**

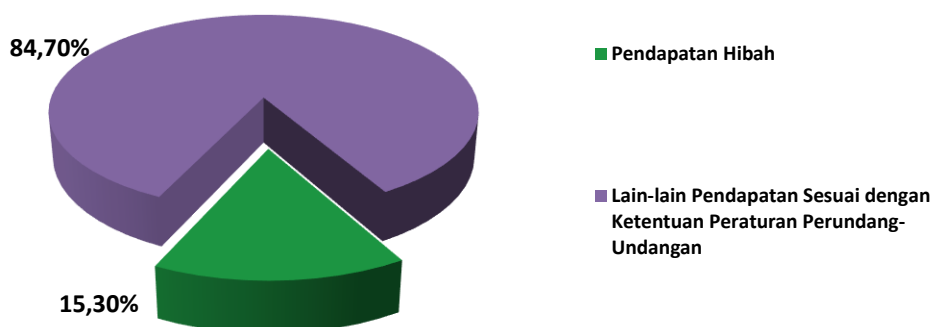


### C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

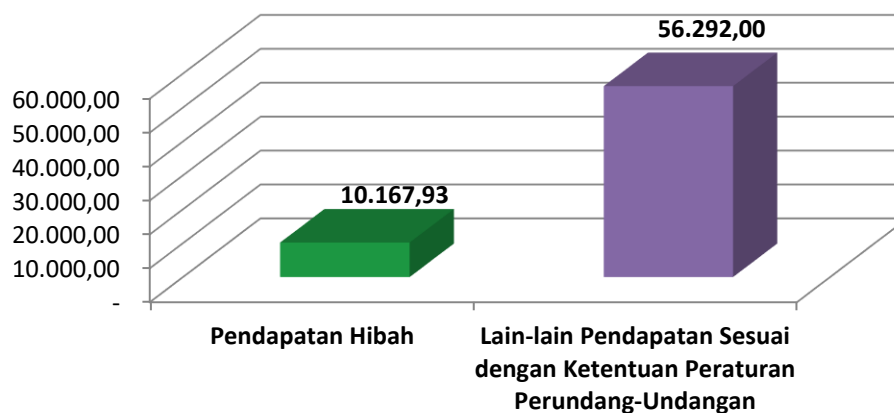
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan sebesar Rp.66.459.928.000,- terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah	Rp.	10.167.928.000
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	<u>56.292.000.000</u>
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	66.459.928.000

**Gambar 5.a. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 5.b. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 ( Dalam jutaan Rupiah)**

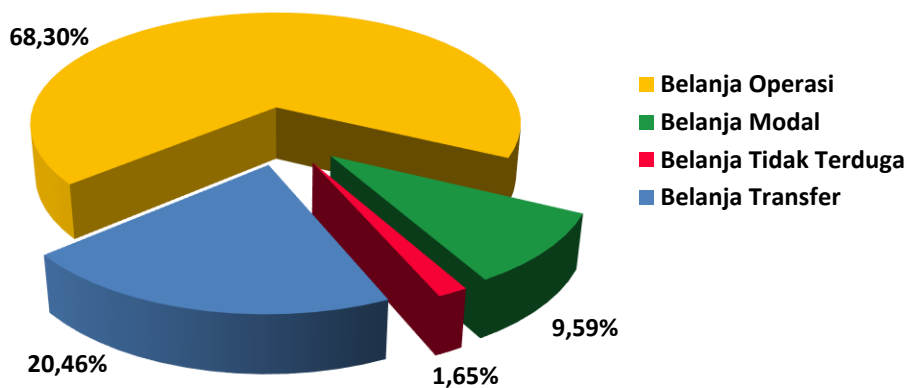


### II. BELANJA

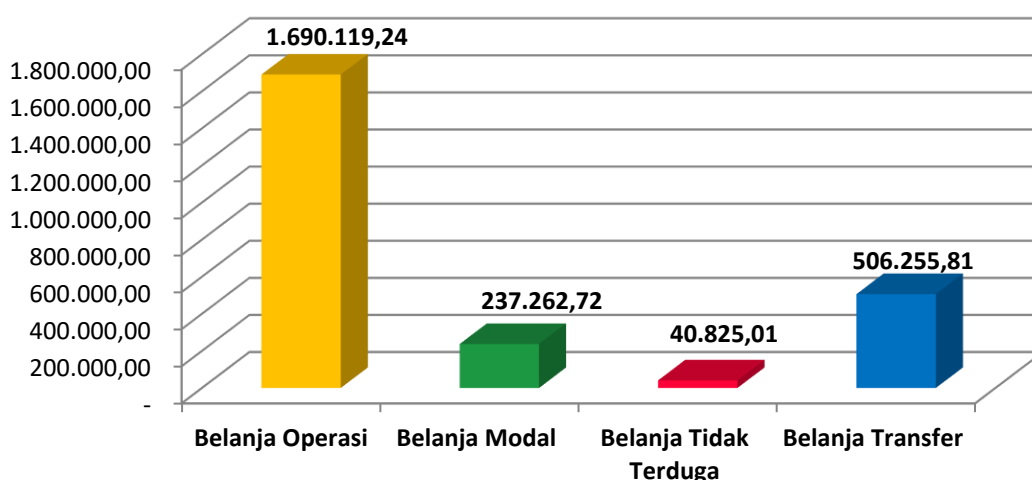
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 menargetkan Belanja sebesar Rp. 2.474.462.781.691,- yang direncanakan untuk membiayai :

a. Belanja Operasi	Rp.	1.690.119.237.165
b. Belanja Modal	Rp.	237.262.722.843
c. Belanja Tidak Terduga	Rp.	40.825.011.534
d. Belanja Transfer	Rp.	<u>506.255.810.149</u>
Total Belanja	Rp.	2.474.462.781.691

**Gambar 6.a. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 6.b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Dalam jutaan Rupiah)**

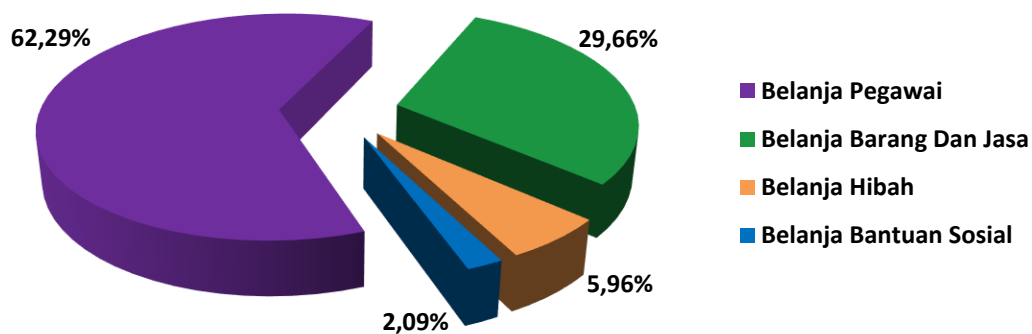


**A. BELANJA OPERASI**

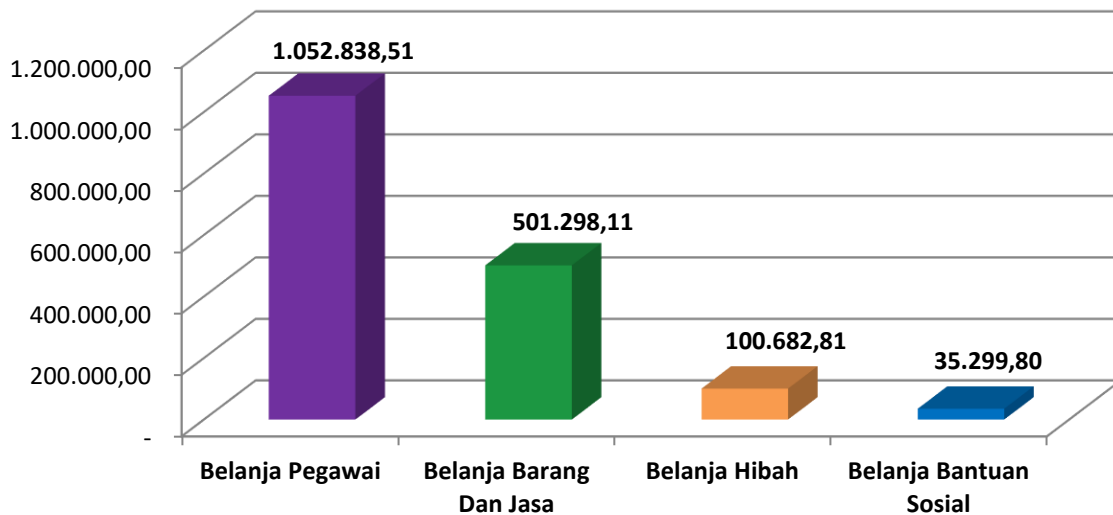
Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp.1.690.119.237.165 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.052.838.514.812
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 501.298.111.305
3. Belanja Bantuan Hibah	Rp. 100.682.809.828
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 35.299.801.220
<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>Rp. 1.690.119.237.165</b>

**Gambar 7.a. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 7.b. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021  
(Dalam jutaan Rupiah)**

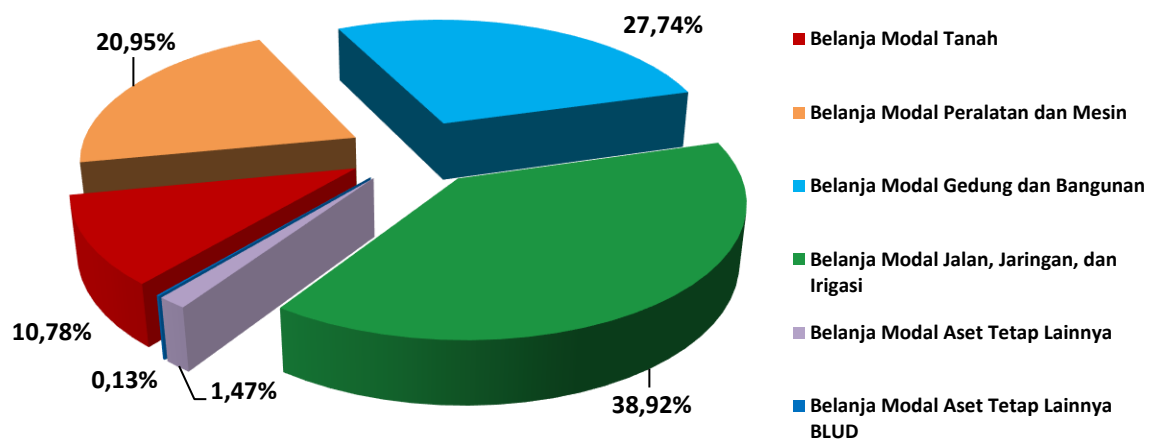


**B. BELANJA MODAL**

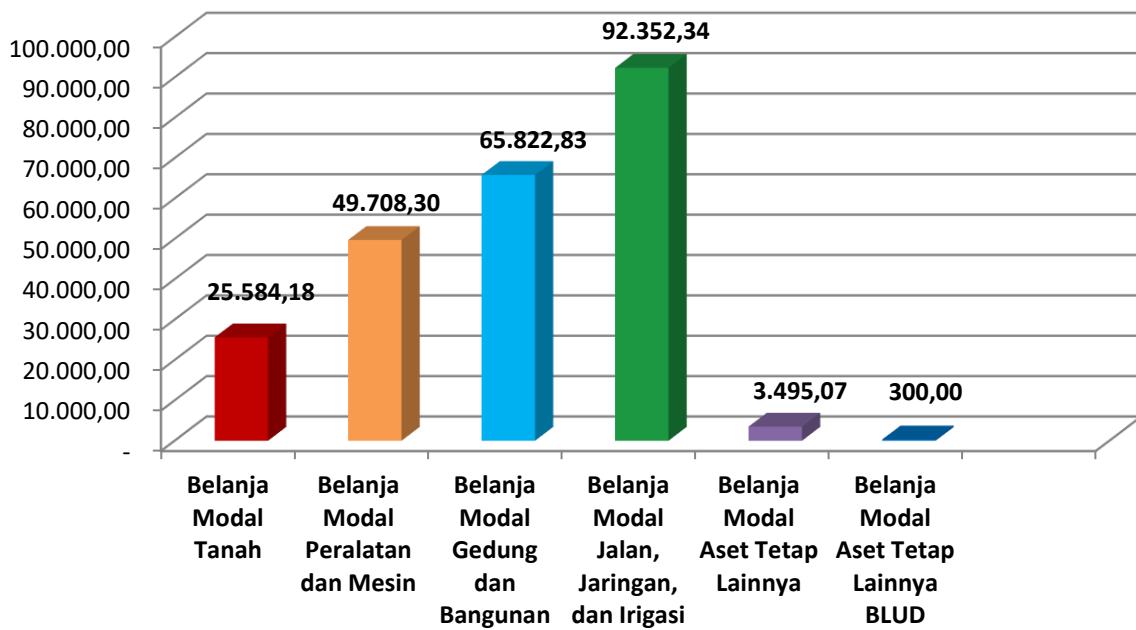
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.237.262.722.843 terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah	Rp. 25.584.183.512
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 49.708.296.873
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 65.822.828.514
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 92.352.342.700
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 3.495.071.244
6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	Rp. 300.000.000
<b>Total Belanja Langsung</b>	<b>Rp.237.262.722.843</b>

**Gambar 8.a. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021**



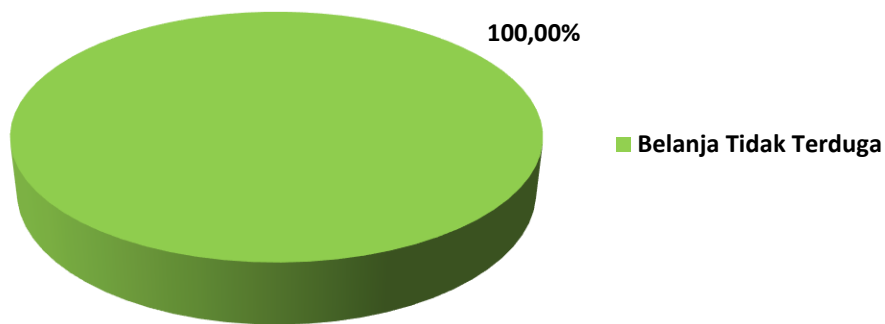
**Gambar 8.b. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2021  
(Dalam jutaan Rupiah)**



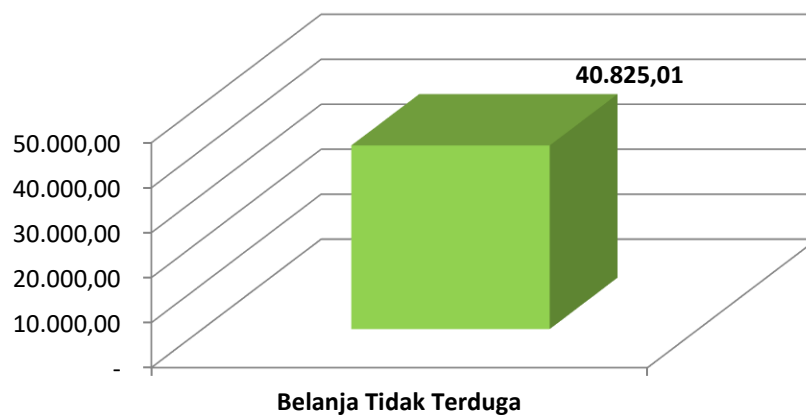
### C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.40.825.011.534,-

**Gambar 9.a. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 9.b. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021  
(Dalam jutaan Rupiah)**



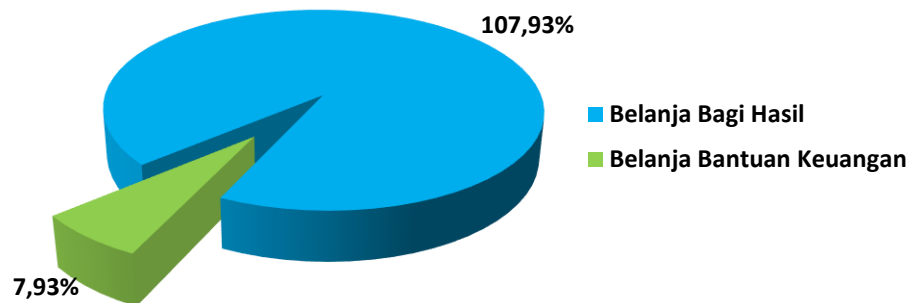


#### D. BELANJA TRANSFER

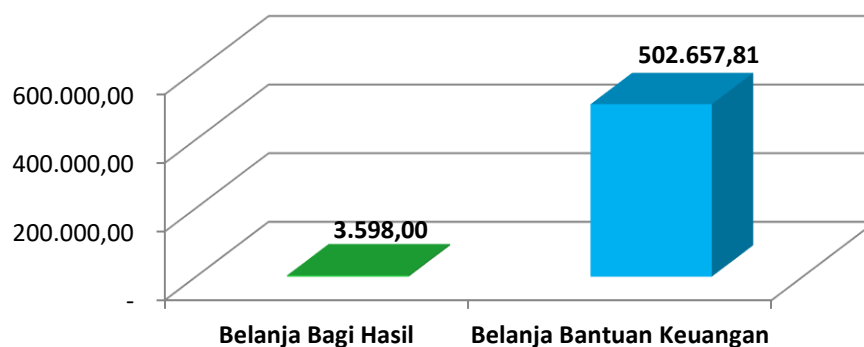
Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.506.255.810.149,- terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil	Rp. 3.598.000.000
2. Belanja Bantuan Keuangan	<u>Rp. 502.657.810.149</u>
Total Belanja Transfer	Rp.506.255.810.149

**Gambar 10.a. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 10.b. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 (Dalam jutaan Rupiah)**

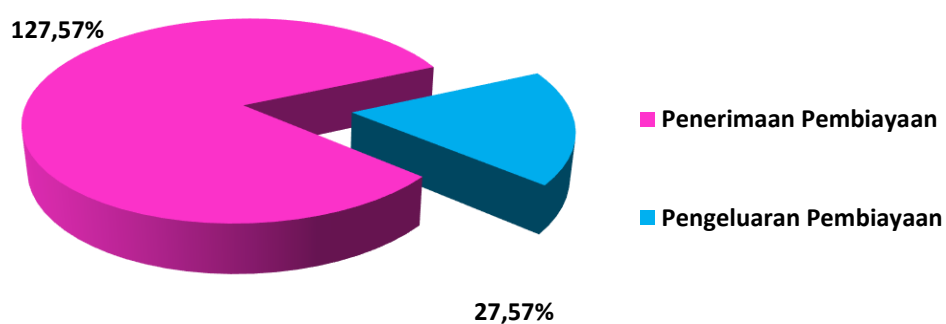


#### III. PEMBIAYAAN

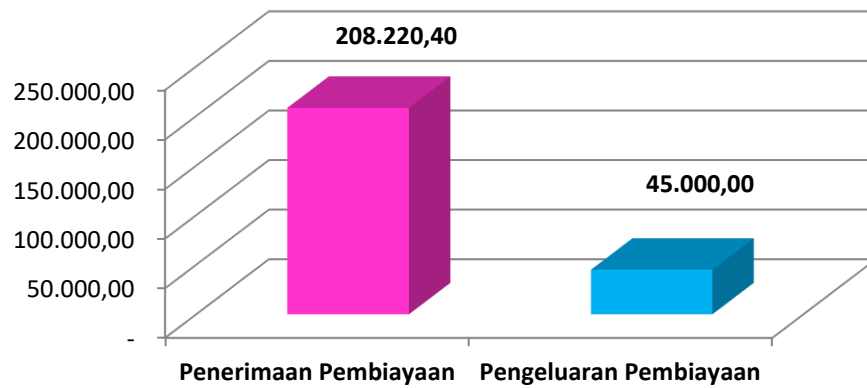
Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh Defisit sebesar Rp.163.220.396.493,- Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 208.220.396.493
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 45.000.000.000</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 163.220.396.493

**Gambar 11.a. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021**



**Gambar 11.b. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021  
(Dalam jutaan Rupiah)**



**a. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 208.220.396.493 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 208.220.396.493.

**b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 45.000.000.000 berupa Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp.20.000.000.000 serta Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp.25.000.000.000.

**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH  
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 dikelompokkan berdasarkan urusan-urusan dan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer dan dirinci dalam program-program prioritas pada masing-masing SKPD sebagai berikut :

**I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

**A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.713.234.951.078,00** pada Dinas Pendidikan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui :

1. Program Pengelolaan Pendidikan.
2. Program Pengembangan Kurikulum.
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

**B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.426.754.578.102,00** pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Dr. H. Moh. Anwar.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan melalui :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

**C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.187.725.334.975,00** pada Dinas PU. Bina Marga, Dinas PU. Pengairan dan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Pengembangan Permukiman.
7. Program Penataan Bangunan Gedung.
8. Program Penyelenggaraan Jalan.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

**D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.8.225.716.210,00** pada Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Kawasan Permukiman

**E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.14.632.979.283,00** pada Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

#### **F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.20.351.917.466,00** pada Dinas Sosial.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Pemberdayaan Sosial.
2. Program Rehabilitasi Sosial.
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
4. Program Penanganan Bencana.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

### **II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

#### **A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.22.427.876.216,00** pada Dinas Tenaga Kerja.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja.
3. Program Hubungan Industrial.

#### **B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.6.036.456.060,00** pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak adalah :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Program Perlindungan Perempuan.
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

#### **C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.11.077.297.818,00** pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

#### **D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.16.437.045.512,00** pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan adalah :

1. Program Penatagunaan Tanah.

#### **E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.14.445.082.160,00** pada Dinas Lingkungan Hidup.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh).
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
8. Program Pengelolaan Persampahan.

**F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.11.648.409.447,00** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Program Pendaftaran Penduduk.
2. Program Pencatatan Sipil.
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

**G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.28.787.510.815,00** pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah :

1. Program Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

**H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.10.133.123.266,00** pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana adalah :

1. Program Pengendalian Penduduk.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb).
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks).

**I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.45.851.058.525, 00** pada Dinas Perhubungan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan adalah :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj).
2. Program Pengelolaan Pelayaran.

**J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.15.497.564.987,00** pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik.
2. Program Aplikasi Informatika.

**K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.6.047.011.084,00** pada Dinas Koperasi Usaha Mikro.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah adalah :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.
3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM).
6. Program Pengembangan UMKM.

**L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.5.691.584.834,00** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal adalah :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Program Pelayanan Penanaman Modal.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

**M. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Anggaran belanja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.12.602.991.624,00** pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Prioritas Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

**N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.39.551.668,00** pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik adalah :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial.

**O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.8.866.200,00** pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian adalah :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

**P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.2.382.996.712,00** pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan adalah :

1. Program Pengembangan Kebudayaan.
2. Program Pembinaan Sejarah.
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
4. Program Pengelolaan Permuseuman.

**Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.4.786.046.343,00** pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan adalah :

1. Program Pembinaan Perpustakaan.
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

#### **R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.411.475.000,00** pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan adalah :

1. Program Pengelolaan Arsip.

### **III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

#### **A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.11.712.045.857,00** pada Dinas Perikanan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan adalah :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

#### **B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.999.055.746,00** pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata adalah :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

#### **C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.62.188.005.393,00** pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian adalah :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Perizinan Usaha Pertanian.
5. Program Penyuluhan Pertanian.

#### **D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.21.467.384.422,00** pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan adalah :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.
5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

#### **E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.3.556.248.476,00** pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian adalah :

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

#### **F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.52.944.454,00** pada Dinas Tenaga Kerja.

Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi adalah :

1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

#### IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.115.197.242.807,00** pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Anggaran Belanja Pada Sekretariat Daerah sebesar **Rp.52.958.364.286,00** dengan Program Prioritas sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

Anggaran Belanja Pada Sekretariat DPRD sebesar **Rp.62.238.878.521,00** dengan Program Prioritas sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

#### V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

##### A. PERENCANAAN

Anggaran belanja Perencanaan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.10.607.770.355,00** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas Perencanaan adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

##### B. KEUANGAN

Anggaran belanja Keuangan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.549.909.462.783,00** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar **Rp.505.920.160,00** dengan Prioritas Program adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan sebesar **Rp.549.403.542.623,00** terdiri dari :

- A. Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah direncanakan sebesar **Rp.51.379.362.330,00**
- B. Anggaran Belanja pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sebagai **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)** yang mempunyai kewenangan menyalurkan Dana Bantuan Keuangan ke Desa serta Penyediaan Belanja Bantuan Tidak Terduga direncanakan sebesar **Rp.498.530.100.453,00** dengan Prioritas Program adalah :
  1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

##### C. KEPEGAWAIAN

Anggaran belanja Kepegawaian Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.11.740.951.690,00** pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prioritas Kepegawaian adalah :

1. Program Kepegawaian Daerah.

##### D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.957.161.310,00** pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Prioritas Pendidikan dan Pelatihan adalah :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Program Kepegawaian Daerah.



#### **E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Anggaran belanja Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.139.838.996,00** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Prioritas Penelitian dan Pengembangan adalah :

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

#### **VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **A. INSPEKTORAT DAERAH**

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.14.948.904.562,00** pada Inspektorat.

Prioritas Pengawasan adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

#### **VII. UNSUR KEWILAYAHAN**

##### **A. KECAMATAN**

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.76.216.630.531,00** pada Kecamatan dan Kelurahan.

Prioritas Pengawasan adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

#### **VIII. PEMERINTAHAN UMUM**

##### **A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.8.531.708.924,00** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Prioritas Pemerintahan Umum adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga nampak dalam ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA				
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.164.743.186.269</b>	<b>177.571.160.005</b>	<b>-</b>	<b>28.611.130.840</b>	<b>1.370.925.477.114</b>
<b>1.01.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>	<b>680.493.986.199</b>	<b>32.740.964.879</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>713.234.951.078</b>
1.01.0.00.0.00.01.00	Dinas Pendidikan	680.493.986.199	32.740.964.879	-	-	713.234.951.078
<b>1.02.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>	<b>380.230.188.573</b>	<b>46.476.389.529</b>	<b>-</b>	<b>48.000.000</b>	<b>426.754.578.102</b>
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	380.230.188.573	46.476.389.529	-	48.000.000	426.754.578.102
<b>1.03.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>63.557.775.038</b>	<b>98.284.429.097</b>	<b>-</b>	<b>25.883.130.840</b>	<b>187.725.334.975</b>
1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas PU Sumber Daya Air	11.210.896.312	13.313.410.351	-	3.300.000.000	27.824.306.663
1.03.0.00.0.00.02.00	Dinas PU Bina Marga	12.198.479.297	58.572.661.356	-	15.607.130.840	86.378.271.493
1.03.1.04.2.10.05.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	40.148.399.429	26.398.357.390	-	6.976.000.000	73.522.756.819
<b>1.04.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>	<b>5.545.716.210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.680.000.000</b>	<b>8.225.716.210</b>
1.03.1.04.2.10.05.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	5.545.716.210	-	-	2.680.000.000	8.225.716.210
<b>1.05.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>14.608.092.183</b>	<b>24.887.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.632.979.283</b>
1.05.0.00.0.00.01.00	Satuan Polisi Pamong Praja	9.950.682.289	23.702.400	-	-	9.974.384.689
1.05.0.00.0.00.04.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.657.409.894	1.184.700	-	-	4.658.594.594
<b>1.06.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Sosial</b>	<b>20.307.428.066</b>	<b>44.489.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.351.917.466</b>
1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	20.307.428.066	44.489.400	-	-	20.351.917.466
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>162.145.903.064</b>	<b>38.316.442.097</b>	<b>-</b>	<b>13.849.603.110</b>	<b>214.311.948.271</b>
<b>2.07.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>	<b>18.557.398.756</b>	<b>55.477.460</b>	<b>-</b>	<b>3.815.000.000</b>	<b>22.427.876.216</b>
2.07.3.32.0.00.01.00	Dinas Tenaga Kerja	18.557.398.756	55.477.460	-	3.815.000.000	22.427.876.216
<b>2.08.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b>	<b>6.036.456.060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.036.456.060</b>
2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	6.036.456.060	-	-	-	6.036.456.060
<b>2.09.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>	<b>10.971.930.828</b>	<b>105.366.990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.077.297.818</b>
2.09.3.27.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	10.971.930.828	105.366.990	-	-	11.077.297.818
<b>2.10.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>	<b>555.260.000</b>	<b>15.881.785.512</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.437.045.512</b>
1.03.1.04.2.10.05.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	555.260.000	15.881.785.512	-	-	16.437.045.512
<b>2.11.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>14.216.594.290</b>	<b>228.487.870</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.445.082.160</b>
2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	14.216.594.290	228.487.870	-	-	14.445.082.160
<b>2.12.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>	<b>10.587.322.959</b>	<b>1.061.086.488</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.648.409.447</b>
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.587.322.959	1.061.086.488	-	-	11.648.409.447

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA				
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
<b>2.13.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	<b>19.414.096.585</b>	<b>128.811.120</b>	-	<b>9.244.603.110</b>	<b>28.787.510.815</b>
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.414.096.585	128.811.120	-	9.244.603.110	28.787.510.815
<b>2.14.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	<b>8.743.220.946</b>	<b>1.389.902.320</b>	-	-	<b>10.133.123.266</b>
2.08.2.14.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8.743.220.946	1.389.902.320	-	-	10.133.123.266
<b>2.15.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>	<b>27.113.302.374</b>	<b>18.637.756.151</b>	-	<b>100.000.000</b>	<b>45.851.058.525</b>
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	27.113.302.374	18.637.756.151	-	100.000.000	45.851.058.525
<b>2.16.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>	<b>15.328.009.577</b>	<b>169.555.410</b>	-	-	<b>15.497.564.987</b>
2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.328.009.577	169.555.410	-	-	15.497.564.987
<b>2.17.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>	<b>6.047.011.084</b>	-	-	-	<b>6.047.011.084</b>
2.17.0.00.0.00.01.00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6.047.011.084	-	-	-	6.047.011.084
<b>2.18.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>	<b>5.490.372.779</b>	<b>201.212.055</b>	-	-	<b>5.691.584.834</b>
2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.490.372.779	201.212.055	-	-	5.691.584.834
<b>2.19.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga</b>	<b>12.085.401.123</b>	<b>327.590.501</b>	-	<b>190.000.000</b>	<b>12.602.991.624</b>
2.19.2.22.3.26.01.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	12.085.401.123	327.590.501	-	190.000.000	12.602.991.624
<b>2.20.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>	<b>39.551.668</b>	-	-	-	<b>39.551.668</b>
2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	39.551.668	-	-	-	39.551.668
<b>2.21.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>	<b>8.866.200</b>	-	-	-	<b>8.866.200</b>
2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.866.200	-	-	-	8.866.200
<b>2.22.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>	<b>1.861.870.712</b>	<b>21.126.000</b>	-	<b>500.000.000</b>	<b>2.382.996.712</b>
2.19.2.22.3.26.01.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	1.861.870.712	21.126.000	-	500.000.000	2.382.996.712
<b>2.23.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>	<b>4.677.762.123</b>	<b>108.284.220</b>	-	-	<b>4.786.046.343</b>
2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.677.762.123	108.284.220	-	-	4.786.046.343
<b>2.24.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>	<b>411.475.000</b>	-	-	-	<b>411.475.000</b>
2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	411.475.000	-	-	-	411.475.000
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>83.808.320.184</b>	<b>13.122.364.164</b>	-	<b>3.045.000.000</b>	<b>99.975.684.348</b>
<b>3.25.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>10.876.859.197</b>	<b>186.660</b>	-	<b>835.000.000</b>	<b>11.712.045.857</b>
3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Perikanan	10.876.859.197	186.660	-	835.000.000	11.712.045.857

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA				
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
<b>3.26.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>	<b>996.755.646</b>	<b>2.300.100</b>	-	-	<b>999.055.746</b>
2.19.2.22.3.26.01.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	996.755.646	2.300.100	-	-	999.055.746
<b>3.27.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>	<b>58.388.319.295</b>	<b>1.934.686.098</b>	-	<b>1.865.000.000</b>	<b>62.188.005.393</b>
2.09.3.27.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	2.804.881.926	-	-	1.590.000.000	4.394.881.926
3.27.0.00.0.00.01.00	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	55.583.437.369	1.934.686.098	-	275.000.000	57.793.123.467
<b>3.30.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>	<b>10.286.574.166</b>	<b>11.180.810.256</b>	-	-	<b>21.467.384.422</b>
3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.286.574.166	11.180.810.256	-	-	21.467.384.422
<b>3.31.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>	<b>3.206.867.426</b>	<b>4.381.050</b>	-	<b>345.000.000</b>	<b>3.556.248.476</b>
3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.206.867.426	4.381.050	-	345.000.000	3.556.248.476
<b>3.32.</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>	<b>52.944.454</b>	-	-	-	<b>52.944.454</b>
2.07.3.32.0.00.01.00	Dinas Tenaga Kerja	52.944.454	-	-	-	52.944.454
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>111.438.944.733</b>	<b>3.758.298.074</b>	-	-	<b>115.197.242.807</b>
<b>4.01.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>49.218.455.012</b>	<b>3.739.909.274</b>	-	-	<b>52.958.364.286</b>
4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	49.218.455.012	3.739.909.274	-	-	52.958.364.286
<b>4.02.</b>	<b>Sekretariat Dprd</b>	<b>62.220.489.721</b>	<b>18.388.800</b>	-	-	<b>62.238.878.521</b>
4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	62.220.489.721	18.388.800	-	-	62.238.878.521
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>71.415.961.229</b>	<b>1.364.136.172</b>	<b>40.825.011.534</b>	<b>460.750.076.199</b>	<b>574.355.185.134</b>
<b>5.01.</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>10.198.518.218</b>	<b>409.252.137</b>	-	-	<b>10.607.770.355</b>
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.198.518.218	409.252.137	-	-	10.607.770.355
<b>5.02.</b>	<b>Keuangan</b>	<b>48.008.544.115</b>	<b>325.830.935</b>	<b>40.825.011.534</b>	<b>460.750.076.199</b>	<b>549.909.462.783</b>
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	505.920.160	-	-	-	505.920.160
5.02.0.00.0.00.01.00	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	47.502.623.955	325.830.935	40.825.011.534	460.750.076.199	549.403.542.623
<b>5.03.</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>11.112.177.290</b>	<b>628.774.400</b>	-	-	<b>11.740.951.690</b>
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.112.177.290	628.774.400	-	-	11.740.951.690
<b>5.04.</b>	<b>Pendidikan Dan Pelatihan</b>	<b>956.882.610</b>	<b>278.700</b>	-	-	<b>957.161.310</b>
5.03.5.04.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	956.882.610	278.700	-	-	957.161.310
<b>5.05.</b>	<b>Penelitian Dan Pengembangan</b>	<b>1.139.838.996</b>	-	-	-	<b>1.139.838.996</b>
5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.139.838.996	-	-	-	1.139.838.996
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>14.568.542.802</b>	<b>380.361.760</b>	-	-	<b>14.948.904.562</b>
<b>6.01.</b>	<b>Inspektorat Daerah</b>	<b>14.568.542.802</b>	<b>380.361.760</b>	-	-	<b>14.948.904.562</b>
6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat	14.568.542.802	380.361.760	-	-	14.948.904.562
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>73.553.949.180</b>	<b>2.662.681.351</b>	-	-	<b>76.216.630.531</b>
<b>7.01.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>73.553.949.180</b>	<b>2.662.681.351</b>	-	-	<b>76.216.630.531</b>
7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Kota Sumenep	9.253.648.395	1.805.087.673	-	-	11.058.736.068

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA				JUMLAH BELANJA
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	
7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Kalianget	2.700.091.172	63.560.381	-	-	2.763.651.553
7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Talango	2.168.741.332	53.623.800	-	-	2.222.365.132
7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Manding	2.872.973.616	38.636.862	-	-	2.911.610.478
7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Bluto	2.887.968.555	41.092.560	-	-	2.929.061.115
7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Saronggi	2.787.317.268	-	-	-	2.787.317.268
7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Lenteng	2.226.654.017	14.467.200	-	-	2.241.121.217
7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Giligenting	2.162.309.787	38.814.600	-	-	2.201.124.387
7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan Guluk-Guluk	2.011.670.743	29.030.628	-	-	2.040.701.371
7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Ganding	2.536.606.508	31.161.240	-	-	2.567.767.748
7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Pragaan	2.739.763.163	28.939.020	-	-	2.768.702.183
7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Rubaru	2.397.820.812	80.938.651	-	-	2.478.759.463
7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Ambunten	2.691.129.931	32.539.320	-	-	2.723.669.251
7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Pasongsongan	2.092.244.766	46.640.550	-	-	2.138.885.316
7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Dasuk	2.374.887.100	24.231.900	-	-	2.399.119.000
7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Batang-Batang	2.730.574.614	21.844.680	-	-	2.752.419.294
7.01.0.00.0.00.17.00	Kecamatan Batuputih	2.558.878.007	12.159.576	-	-	2.571.037.583
7.01.0.00.0.00.18.00	Kecamatan Gapura	2.718.858.261	18.878.640	-	-	2.737.736.901
7.01.0.00.0.00.19.00	Kecamatan Dungkek	2.230.483.533	53.262.630	-	-	2.283.746.163
7.01.0.00.0.00.20.00	Kecamatan Gayam	2.760.026.441	30.001.620	-	-	2.790.028.061
7.01.0.00.0.00.21.00	Kecamatan Nonggunong	2.407.292.122	21.217.620	-	-	2.428.509.742
7.01.0.00.0.00.22.00	Kecamatan Raas	2.028.733.661	30.033.120	-	-	2.058.766.781
7.01.0.00.0.00.23.00	Kecamatan Masalembu	1.858.067.506	21.894.180	-	-	1.879.961.686
7.01.0.00.0.00.24.00	Kecamatan Arjasa	3.102.407.793	24.408.780	-	-	3.126.816.573
7.01.0.00.0.00.25.00	Kecamatan Sapeken	2.404.225.426	22.005.940	-	-	2.426.231.366
7.01.0.00.0.00.26.00	Kecamatan Batuan	2.464.823.308	53.801.400	-	-	2.518.624.708
7.01.0.00.0.00.27.00	Kecamatan Kangayan	2.385.751.343	24.408.780	-	-	2.410.160.123
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>8.444.429.704</b>	<b>87.279.220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.531.708.924</b>
<b>8.01.</b>	<b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>	<b>8.444.429.704</b>	<b>87.279.220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.531.708.924</b>
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.444.429.704	87.279.220	-	-	8.531.708.924
		<b>1.690.119.237.165</b>	<b>237.262.722.843</b>	<b>40.825.011.534</b>	<b>506.255.810.149</b>	<b>2.474.462.781.691</b>